

Lampiran 1

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara
(Pengelola PNPM-Mandiri Perkotaan,
Pemerintah Kota Semarang)

Diberitahukan dengan hormat bahwa kami sedang menyusun Disertasi Program Doktor Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan judul *Analisis Kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kota Semarang*.

Dalam penyusunan disertasi tersebut kami memerlukan data tentang Kelembagaan PNPM-MP di Kota Semarang yang bersifat kualitatif melalui wawancara dengan informan yaitu : BKM dan KSM maupun *Forum Group Discussion (FGD)* yang melibatkan unsur lembaga Pemerintah (Birokrat), Konsultan dan Lembaga Masyarakat BKM/KSM)

Sehubungan dengan hal tersebut mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr untuk berkenan berdiskusi/wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang sudah kami susun (terlampir).

Hal-hal yang mungkin belum termasuk dalam pedoman wawancara tersebut dapat kita diskusikan (dalam forum yang kita sepakati) untuk menjaring data sesuai kebutuhan kami untuk analisis yang bersifat kualitatif.

Atas perkenan/bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr meluangkan waktu disampaikan terima kasih.

Semarang, Juni 2012

Hormat kami,

Munawar Noor

Pedoman Wawancara (Interview)

Informan : BKM, KSM (berdasarkan Purposive (Sengaja))

No	Konsep dan Fenomena	Pedoman Wawancara (Interview)
1	Kelembagaan PNPM-MP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Profil BKM/KSM (pembentukan dan perkembangan) ▪ Visi dan misi BKM ▪ Pelaksanaan siklus PNPM-MP ▪ Pelaksanaan RWT ▪ Pelaksanaan Tri-Daya (lingkungan, Sosial, Ekonomi) ▪ Program Kerja ▪ Kendala/Tantangan/Peluang BKM ▪ Kemitraan BKM dengan lembaga lain
2	<p>Sinergitas Kelembagaan PNPM-MP</p> <p>a. Integrasi Program</p> <p>b. Kelembagaan Program di masyarakat</p> <p>c. Koordinasi antar Program (Pusat-Daerah)</p> <p>d. Kemitraan dan kerjasama kelembagaan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Perencanaan partisipatif ▪ Keterlibatan dan antusiasme masyarakat pada program ▪ Konsistensi, integrasi, sinergi dalam penanggulangan kemiskinan ▪ Peran TKPK-D dalam program ▪ Peran PJOK dalam program ▪ Fungsi BKM dalam menyalurkan dana BLM ▪ Integrasi antar lembaga ▪ Mekanisme Pro-Poor Budgeting ▪ Alokasi pembiayaan daerah ▪ Mekanisme pencairan dana BLM ▪ Pemeliharaan asset hasil kegiatan ▪ Penyatuan gerak langkah <i>stakeholder</i> ▪ Pemenuhan hak dasar warga miskin ▪ Kelembagaan PNPM-MP berbasis pemberdayaan, ▪ Penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi mikro,

Lampiran 2 :

Desain Rancangan FGD

1) Membentuk Tim

Tim FGD umumnya mencakup:

1. **Moderator**, terlatih dan memahami masalah yang dibahas serta tujuan penelitian.
2. **Pencatat Proses/Notulen**, mencatat inti permasalahan yang didiskusikan serta dinamika kelompoknya.
3. **Penghubung Peserta**, mengenal (person, medan), menghubungi, dan memastikan partisipasi peserta.
4. **Penyedia Logistik**, berkaitan dengan penyediaan transportasi, kebutuhan rehat, konsumsi, akomodasi, dll.

2) Dokumentasi, dokumen FGD: memotret, merekam (audio/video), dan menjamin berjalannya alat-alat dokumentasi,

3) Memilih dan Mengatur Tempat

Hendaknya merupakan tempat yang netral, nyaman, aman, tidak bising, berventilasi cukup, dan bebas dari gangguan dengan tempat duduk yang memadai.

4) Menyiapkan Logistik

Seperti transportasi; properti rehat: alat ibadah, konsumsi (makanan kecil dan atau makan utama); insentif; akomodasi (jika diperlukan);

5) Jumlah Peserta

Jumlah yang ideal adalah **7-11 orang**, namun ada juga yang menyarankan jumlah peserta FGD lebih kecil. Terlalu sedikit tidak memberikan variasi yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam.

6) Pertanyaan FGD

Untuk mengembangkan pertanyaan FGD, berdasarkan pada :

- a. Pengelolaan BKM/KSM

- b. Integrasi program, kelembagaan program, koordinasi antara program (pusat-daerah), kemitraan dan kerjasama kelembagaan (pemerintah, dunia usaha, masyarakat);
- c. Kerangka formulasi usulan model kelembagaan PNPM-MP

7) Analisis Data dan Penyusunan Laporan FGD

Langkah-langkahnya dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Mendengarkan atau melihat kembali rekaman FGD
2. Tulis kembali hasil rekaman secara utuh (membuat transkrip)
3. Baca kembali hasil transkrip
4. Cari mana masalah-masalah (topik-topik) yang menonjol dan berulang-ulang muncul dalam transkrip, lalu kelompokkan menurut masalah atau topik. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda untuk mengurangi “bias” dan “subjektifitas”. Pengkategorian bisa juga dilakukan dengan mengikuti topik-topik dan subtopik dalam Panduan diskusi. Jangan lupa merujuk catatan yang dibuat selama proses FGD berlangsung.

Lampiran 3

DAFTAR INFORMAN BKM / KSM

No	Nama BKM/KSM	Kelurahan	Kecamatan
A	BKM Bojongsalaman	Bojongsalaman	Semarang Barat
1	KSM Elok	Bojongsalaman	Semarang Barat
2	KSM Pustim	Bojongsalaman	Semarang Barat
3	KSM Salaman	Bojongsalaman	Semarang Barat
4	KSM Merpati	Bojongsalaman	Semarang Barat
5	KSM Sekar	Bojongsalaman	Semarang Barat
B	BKM Manunggal Sejahtera	Tandang	Tembalang
1	KSM Tirto Agung	Tandang	Tembalang
2	KSM Anak Bangsa 1	Tandang	Tembalang
3	KSM Manunggal	Tandang	Tembalang
4	KSM Rogo Bersih	Tandang	Tembalang
5	KSM Elang	Tandang	Tembalang

Transkrip Hasil Wawancara dengan Informan (BKM, KSM)

I. BADAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT (BKM)

1. BKM : Manunggal Sejahtera, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang.

1.1. Kelembagaan BKM

a. Profil BKM : Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono (Koordinator BKM Manunggal Sejahtera, Kelurahan Tandang) tanggal 2-5 Nopember 2012, dasar pemikiran pembentukan BKM adalah :

1. BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang menggerakkan kelembagaan PNPM-MP dan milik seluruh penduduk kelurahan;
2. BKM merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang posisinya di luar institusi pemerintah;
3. Semua penduduk kelurahan dapat dipilih menjadi anggota BKM sepanjang memenuhi kriteria dasar yang telah ditentukan dalam pemilihan anggota BKM secara berjenjang tanpa pencalonan dan tanpa kampanye;
4. BKM adalah wahana yang memberi peluang orang-orang baik dan tulus (ikhlas) mengaktualisasikan dirinya untuk orang lain.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka BKM Manunggal Sejahtera dibentuk pertama kali melalui Rembug Pembentukan BKM pada tanggal 8 November 2007 yang dihadiri oleh 225 orang, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW dan lain-lain.

Lebih lanjut Koordinator BKM Manunggal Sejahtera menambahkan bahwa, kepengurusan BKM sesuai ketentuan PNPM-MP hanya 9-11 orang, tetapi di BKM ini menjadi 21 orang dan inilah karakteristik BKM Manunggal Sejahtera yang meliputi wilayah 14 RW dengan 125 RT dengan jumlah penduduk miskin 2.157 orang (11,8%).

Bapak H. Hasyim Hasan, SE (Dewan Pengawas), yaitu :

- a) Penduduk tetap Kelurahan Tandang
 - b) Orang baik, jujur dan dapat dipercaya
 - c) Siap berkorban untuk kepentingan orang banyak
- b. Pelaksanaan RWT, Dewan Pengawas BKM (Bapak H. Hasyim Hasan, SE) menjelaskan bahwa sebagai representasi dari nilai-nilai universal, lembaga BKM memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkomunikasikan segala kebijakan yang diambil terkait dengan penanggulangan kemiskinan, serta memberikan laporan secara formal dalam periode waktu tertentu (dalam waktu 1 tahun).

Dalam Wawancara lanjutan Koordinator BKM maupun Dewan Pengawas BKM Manunggal Sejahtera, tanggal 28 Desember 2013 menjelaskan, bahwa BKM sebagai lembaga masyarakat yang dibentuk PNPM-MP sebagai motor penggerak kelembagaan PNPM-MP dalam menyelenggarakan RWT tanpa dihadiri pejabat/lembaga pemerintah baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota.

- c. Mencermati visi dan misi BKM Manunggal Sejahtera, diatas, hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono (Koordinator BKM) menyatakan bahwa BKM Manunggal Sejahtera ingin menunjukkan sosok kelembagaan masyarakat yang aspiratif dan amanah bagi warga dalam kelembagaan PNPM-MP di Kelurahan Tandang.
- d. Hasil wawancara dengan Koordinator BKM dan Dewan Pengawas BKM pada tanggal 10 Desember 2012, beliau berdua menjelaskan bahwa, pelaksanaan siklus PNPM-MP di BKM Manunggal Sejahtera tidak sepenuhnya mengikuti alur siklus PNPM-MP, karena BKM ini masuk periode kepemimpinan ke III, artinya berdasarkan pengalaman BKM sebelumnya dipakai acuan untuk memperpendek siklus dengan tujuan supaya lebih efektif.
- e. Penyusunan PJM Pronangkis (Wawancara dengan Bapak Sugiyono, Koordinator BKM, bulan Januari 2013 menjelaskan bahwa : Tim dalam Musrenbang Kelurahan adalah : RW, RT, BKM, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Sedangkan Tim Musrenbang Kecamatan adalah : Tokoh Masyarakat (RW), LPMK, BKM. Tim Musrenbang Kota adalah : Forum LPMK, Forum BKM, Konsultan semua program, Forum RT/RW, Kepala SKPD, dibuka Walikota, Sambutan Bappeda Provinsi dan dipimpin Bappeda Kota.
(Wawancara lanjutan dengan Koordinator BKM, bahwa pada umumnya PJM Pronangkis yang disusun BKM sekitar 90% kegiatannya masuk dalam Musrenbang Kota, sehingga dapat diperkirakan berapa kegiatan yang dapat dilakukan baik Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan besaran pagu BLM).
- f. (Hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono dan Bapak H. Hasyim Hasan, SE, tanggal 2 Januari 2014) yang menyatakan bahwa, ciri yang melekat pada BKM Mandiri adalah kemampuannya dalam melembagakan mekanisme pemilihan ulang BKM, meningkatkan partisipasi penduduk dewasa dalam pemilihan ulang BKM di tingkat basis, mendorong BKM sebagai pengarah (*steering*) bukan pelaksana (*operator*), dan mendorong masyarakat untuk mengakses sumberdaya luar melalui kegiatan channeling dan kemitraan.

- g. Pengendalian KSM
(hasil wawancara dengan KSM yang dipilih yaitu : KSM Tirta Agung, KSM Anak Bangsa 1, KSM Manunggal, KSM Rogo Bersih, KSM Elang bulan Oktober 2013), dapat dijelaskan bahwa :
- a. Pertemuan BKM dengan KSM hanya kadang-kadang dilakukan terutama apabila akan ada banyuan BLM untuk KSM;
 - b. KSM Lingkungan dan Sosial biasanya sudah bubar kalau kegiatannya sudah selesai, kalau dibentuk KSM baru biasanya anggotanya berbeda;
 - c. KSM Ekonomi (pinjaman dana bergulir) yang macet tidak diambil tindakan apa-apa oleh BKM, sehingga semakin tahun semakin besar dana ekolir yang macet;
 - d. Transparansi kegiatan dan keuangan BKM kepada masyarakat (KSM) setelah diadakan Rembug Warga Tahunan (RWT) di tempel di papan pengumuman, sehingga masyarakat yang peduli dapat melihatnya;

1.2. Sinergi Kelembagaan.

- a. Integrasi Program
Dokumen PJM Pronangkis saat ini telah dijadikan rujukan oleh berbagai pihak untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, untuk membantu pemerintah kelurahan dalam mengusulkan kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh pemerintah melalui APBD dan Dana Aspirasi.
Dengan dilakukannya perencanaan partisipatif yang benar-benar mencerminkan teridentifikasikannya semua persoalan penanggulangan kemiskinan,
Didasarkan pada pengendalian kegiatan yang berbasis pada perencanaan partisipatif yang dapat secara gamblang diterima oleh masyarakat Kelurahan Tandang, ditunjang dengan besarnya keterlibatan masyarakat dan antusiasme yang luar biasa untuk mensukseskan PNPM-MP, tentunya akan lebih mudah dalam menjaga konsistensi, integrasi dan sinergi antara BKM Tandang dengan lembaga lain di tataran pelaku, program (data) maupun rencana kerja strategis lainnya pada saat ini dan masa yang akan datang.
- b. Kelembagaan Program di Masyarakat
Biasanya BKM berhubungan dengan lembaga di tingkat kota itu adalah Satker di PSDA, PPK di Bapermasper dan KB dan PJOK di Kecamatan Tembalang.
PJOK Kecamatan Tembalang termasuk pejabat yang aktif untuk memfasilitasi PNPM-MP di Kota Semarang, sehingga BKM dan pemerintah kelurahan merasa nyaman dalam

kesetaraan kerja sama yang telah dibangun, yang bersangkutan sangat sadar bahwa PNPM-MP ini adalah program unik yang harus didekati dengan aspek pemberdayaan tidak bisa secara struktural birokratis.

Sampai saat ini tidak masalah berarti dalam penyaluran BLM PNPM-MP, karena disadari bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terkait usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat adalah BKM selaku *regulator*, mana yang layak didanai mana yang tidak layak didanai,

Sudah saatnya bagi BKM Manunggal Sejahtera, Kelurahan Tandang membuka akses kemitraan dan channeling dengan pihak luar untuk mengembangkan BKM

c. Koordinasi antar Program (Pusat – Daerah)

Serangkaian tahapan yang telah dilakukan oleh BKM Manunggal Sejahtera dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan kelembagaan PNPM-MP yang tercantum dalam PJM Pronangkis, maupun yang layak didanai oleh BLM PNPM-MP merupakan urutan langkah penyusunan kegiatan yang *pro poor budgeting*, semangat ini adalah ruh dari *daur program partisipatif*, identifikasi – perencanaan – pelaksanaan – monitoring – evaluasi, yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dan BKM,

Alokasi Pembiayaan Daerah 5% dari pagu APBN sudah dianggap sudah memenuhi persyaratan pembiayaan daerah oleh pusat untuk tambahan dana ekolir

Saat menentukan kegiatan yang akan didanai oleh BLM PNPM-MP, biasanya BKM mengundang para pimpinan wilayah di tingkat basis/kelurahan untuk mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencairan dan pemanfaatan BLM. Setelah semua kegiatan yang didanai oleh BLM dicairkan oleh BKM, masing-masing unit pengelola akan melakukan pengawasan kegiatan agar dapat dilaporkan kepada BKM, tim fasilitator, pemerintah kelurahan, PJOK, Satker dan TKPP. Pemeliharaan asset hasil kegiatan, untuk Kelurahan Tandang anggota KSM dan penerima manfaat telah paham dan mengerti bahwa penanggung jawab awal pemeliharaan aset hasil kegiatan adalah mereka.

d. Kemitraan dan Kerjasama Kelembagaan (Dunia Usaha, Masyarakat)

Melakukan sinergitas yang melibatkan seluruh para pemangku kepentingan kelembagaan PNPM-MP di tingkat kelurahan, persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Tandang sangat kompleks, sehingga penyatuan gerak langkah *stakeholder* perlu diarahkan pada persamaan visi dan misi untuk mengakselerasikan berbagai program untuk mengurangi angka kemiskinan. Komunikasi intensif *stakeholder* harus

diwadahi dalam bentuk forum formal dapat difasilitasi oleh BKM dan pemerintah kelurahan, dalam PNPM-MP sebenarnya sudah ada KBK (Komunitas Belajar Kelurahan) atau Forum Relawan, tapi saat ini hanya sekedar papan nama.

Seringkali sebagai pelaku PNPM-MP di tingkat kelurahan, BKM mendapatkan pertanyaan kritis, dengan setiap tahun mendapatkan bantuan anggaran, sudah berapa banyak warga miskin yang dapat diantaskan oleh PNPM-MP (BKM Tandang), karena menurut pihak yang bertanya adalah tidak ada perubahan yang berarti dari warga miskin yang mendapatkan bantuan,

BKM Tandang mempercayai mereka untuk mengelola kegiatan secara langsung sebagai penerima manfaat, artinya basis kegiatan tridaya yang dilakukan adalah bersifat privat/pribadi/keluarga miskin secara langsung tanpa perantara, KSM dan penerima manfaat 100 % warga miskin yang masuk daftar PS-2, karena yang harus berdaya adalah masyarakat (warga miskin) sebagai binaan BKM, bukan pemerintah dan tim fasilitatornya.

Sebaran KSM ekonomi bergulir di tingkat RT/RW di Kelurahan Tandang cukup merata, biasanya mereka adalah para pedagang kelontong di kampung-kampung dan industri rumah tangga, dengan potensi yang telah dimiliki seperti yang disebut diatas.

Diperlukan adanya pembinaan dan perawatan KSM ekonomi bergulir untuk menjadikan mereka embrio wirausaha baru, tetapi selama ini sangat besar kemacetan dana bergulir yang belum ada jalan keluar mengatasinya.

2. BKM : Bojongsalaman, Kelurahan Bojongsalaman Kecamatan Semarang Barat

1.1. Kelembagaan BKM.

a. Profil BKM,

Hasil wawancara dengan Koordinator BKM Bojong Salaman (Bapak HM. Soekidi) pada tanggal 4-5 Januari 2014) menjelaskan bahwa, pada prinsipnya pembentukan BKM adalah melibatkan seluruh masyarakat kelurahan dalam kesepakatan dan kebutuhan bersama.

Pembentukan BKM terlebih dahulu diawali rembug pembentukan panitia, rapat penyusunan tata tertib pemilihan anggota BKM, penyusunan AD/ART, rembug tingkat basis RW/RT untuk sosialisasi dan kesiapan masyarakat untuk pembentukan BKM.

- b. Pelaksanaan RWT
 Hasil wawancara dengan Koordinator BKM Bojong Salaman (Bapak HM. Soekirdi, Nopember 2013) tentang RWT menjelaskan bahwa, sesuai pedoman PNPM-MP RWT adalah merupakan forum tertinggi BKM sebagai representasi seluruh kehendak dan kontrol sosial masyarakat dan diyakini BKM Bojong salaman, RWT : (1) Merupakan salah satu dari alat kontrol masyarakat, bahwasanya pengawasan yang lebih besar oleh masyarakat akan mengurangi resiko penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Momentum untuk menumbuhkan dan mematangkan keputusan dan konsep melalui pertanyaan, sumbang, saran, pendapat dan kritik yang bersifat membangun. (3) Mempersiapkan sikap mental masyarakat untuk dapat memberi dan menerima kritik serta saran yang berkembang dalam musyawarah.
- c. Pelaksanaan Siklus PNPM-MP.
 (Hasil wawancara dengan Koordinator BKM, Bapak HM. Soekirdi, bulan Oktober 2013) menjelaskan bahwa pelaksanaan siklus PNPM-MP di BKM Bojong Salaman tetap mengacu pada pedoman siklus, tetapi dalam banyak hal harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.
- d. Pelaksanaan Kegiatan BKM,
 Wawancara dengan Koordinator di dampingi seorang pengurus (Bapak FX Suroso, SPd) bulan Oktober 2013, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM Bojong Salaman dan KSM-nya berbasiskan PJM Pronangkis yang berorientasi IPM-MDGs. Secara substantif penyusunan PJM MDG'S ini pada dasarnya dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat Kelurahan dengan segala unsur yang ada.
 (Wawancara dengan Koordinator BKM, menjelaskan bahwa diharapkan kedepan BKM Bojong Salaman dapat mengembangkan siklus BLM dan siklus PM tidak hanya pada prosedur siklus, tetapi siklus yang direpresentasikan oleh tingkat partisipasi warga miskin yang diukur dari KPI (*Key Performance Indicator*) dan PAD (*Project Appraisal Document*) serta pelembagaan program yang berbasis partisipasi.
- e. Struktur organisasai BKM.
 Dari struktur kelembagaan BKM Bojong Salaman dapat dijelaskan bahwa saat ini BKM sedang merintis jaringan kerjasama (kemitraan) dengan Bank Syariah Mandiri untuk mengembangkan UPK dalam pelayanan ekolir (hasil wawancara dengan Bapak HM. Soekirdi, Koordinator BKM bulan Oktober 2013).

- f. Pengendalian KSM,
Wawancara dengan Koordinator BKM Manunggal Sejahtera Kelurahan Tandang (Bapak Sugiyono) maupun Koordinator BKM Bojong Salaman (Bapak HM. Soekirdi), pada tanggal 5-7 Agustus 2013, bahwa dalam melakukan pengendalian KSM Binaan di wilayahnya mengacu pada peran utama BKM/KSM sebagai kelembagaan PNPM-MP pada tingkat Kelurahan dan basis.
(Hasil wawancara dengan KSM yang dipilih yaitu : KSM Elok, KSM Pustim, KSM Salaman KSM Merpati, KSM Sekar, pada Bulan Oktober 2013), dapat dideskripsikan, bahwa :
- a. Pertemuan rutin bulanan antara BKM dengan KSM untuk mendorong terpadunya Tri-Daya (Lingkungan, Sosial, Ekonomi) di tataran KSM oleh masing-masing UP, tetapi biasanya tidak semua hadir;
 - b. Belum ada langkah untuk menangani KSM yang anggotanya nunggak pinjaman ekolir, dikhawatirkan akan menular ke yang lain;
 - c. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas BKM di masyarakat dilakukan Rembug Warga Tahunan (RWT) sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja dan pelaksanaan amanah PJM Pronangkis kepada masyarakat secara rutin.
 - d. LPJ hasil auditor Independen (masing-masing BKM) di pasang pada Papan Pengumuman di berbagai titik untuk memudahkan kontrol masyarakat, yang terletak di RT/RW seluruh kelurahan.
 - e. Pertanggungjawaban BKM kepada masyarakat juga diinformasikan kepada Pemerintah Kota Semarang melalui Kepala Kelurahan dan PJOK Kecamatan.
 - f. BKM berupaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (penerima manfaat BLM) melalui berbagai pelatihan yang menunjang ekonomi produktif.

1.2. Sinergi Kelembagaan

- a. Integrasi Program
Penyusunan Perencanaan Partisipatif, Harapan untuk melihat keberhasilan PNPM-MP dalam hal perencanaan partisipatif, mungkin dapat dilihat dari antusiasme warga untuk terlibat secara langsung dalam tahapan-tahapan perencanaan partisipatif yang setiap tahun dilakukan oleh BKM Bojongsalaman, kegiatan tersebut dinamakan *Review Program*, salah satunya adalah dengan cara mengidentifikasi ulang rencana tahunan dan prioritas kegiatan, disesuaikan dengan kondisi kekinian terutama dengan aspek penganggaran dan lokasi kegiatan.

Keterlibatan dan Antusiasme Masyarakat. Hingga saat ini keterlibatan masyarakat dan antusiasme masyarakat masih terjaga, untuk kedua hal tersebut, BKM Bojongsalaman sangat ketat dan tidak kompromi. keterlibatan dan antusiasme dijadikan prasyarat bagi sebuah calon lokasi kegiatan yang akan didanai oleh BLM PNPM-MP, meski sudah masuk dalam perencanaan kegiatan dan terprioritasi, tetapi berdasarkan data mengenai capaian keterlibatan masyarakat dalam siklus (kehadiran rapat, rembug-rembug, keterlibatan pengurus RT/RW/kelompok) masih rendah maupun antusiasme masyarakat dalam persiapan BLM (KSM belum terbentuk, status lahan tidak jelas, tidak ada dana swadaya) maka akan *depending, cancelled*, sehingga mau tidak mau lokasi-lokasi prioritas akan memobilisasi masyarakat agar terlibat dan antusias dalam menjalankan kegiatan PNPM-MP di tingkat wilayah masing-masing.

Konsistensi, Integrasi dan Sinergi. Harus dikatakan bahwa upaya kelembagaan PNPM-MP merupakan proses panjang yang melibatkan banyak pihak terkait sesuai dengan bidang kerja masing-masing, namun tidak semua yang sudah dikonsepsikan mudah untuk dilaksanakan, selalu ada hambatan yang bersifat struktural dan kultural yang membatasi masing-masing pihak untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki,

BKM Bojongsalaman proses untuk mengintegrasikan dan mensinergikan sumber daya dan penganggaran saja melewati sekian banyak proses dan verifikasi, karena memang pada dasarnya setiap pihak terkait telah merasa memiliki 'kapling wilayah' di tingkat masyarakat (warga miskin) dan agak sulit untuk berbagi peran dan tanggungjawab, meskipun sama tujuannya *ikut mengurangi jumlah warga miskin*.

b. Kelembagaan Program di Masyarakat

Selama personil BKM Bojongsalaman pernah ikut dalam kegiatan tingkat kota belum pernah ada sambutan TKPKD, paparan TKPKD, maupun hal lainnya yang terkait dengan kelembagaan TKPKD, jadi sangat sulit membayangkan seperti apa bentuk nyata lembaga TKPKD ini maupun perannya dalam ikut membantu pelaksanaan PNPM-MP di tingkat kelurahan apalagi di tingkat basis.

Peran PJOK. Seringnya PJOK mengumpulkan Koordinator BKM se-Kecamatan Semarang Barat untuk mendiskusikan isu-isu strategis kekinian, menjadikan PJOK menjadi penghubung ideal bagi terkomunikasikannya persoalan di tingkat BKM kepada pihak kecamatan dan kota, dalam TUPOKSI-nya pejabat PJOK tidak kaku dalam memfasilitasi BKM dengan hanya menginformasikan hal-hal terkait PNPM-

MP, pola-pola integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan jika melewati jalur birokrasi kelurahan 'agak tertutup' menjadi lebih lugas apabila lewat jalur BKM (PNPM-MP).

Salah satu langkah yang sering diambil oleh BKM untuk menancapkan pengaruhnya kepada masyarakat agar mengikuti, tunduk dan taat terhadap ketentuan PNPM-MP yang telah digariskan dalam PNPM-MP. Dengan cara seperti itu-lah BKM dapat mengendalikan mekanisme pencairan dan pemanfaatan BLM PNPM-MP menjadi lebih tertib dan sesuai aturan, sehingga mekanisme standar pencairan dan pemanfaatan BLM PNPM-MP seperti pengajuan proposal, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawabannya menjadi mudah dikawal oleh Unit Pengelola masing-masing (UPL, UPS, UPK), pada gilirannya BKM Bojongsalaman akan mudah mempersiapkan perencanaan partisipatif untuk tahap-tahap berikutnya.

Situasi yang terbangun dalam menjalankan program kelembagaan PNPM-MP posisi BKM dianggap sama dan setara dengan lembaga lain, dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari Kelurahan sampai dengan Kota, namun karena BKM belum diatur dalam Perda yang mengatur struktur kelembagaan warga, (RT, RW, LPMK, Karang Taruna, PKK sudah diatur), integrasi yang terjadi tampaknya berhenti pada formalitas mengawal Musrenbang saja, setelah itu bisa hilang begitu saja, padahal kalau mau jujur banyak usulan kegiatan Musrenbang kelurahan diambil dari Rencana Tahunan PJM Pronangkis yang sudah disosialisasikan pada saat RWT (Rembug Warga Tahunan).

c. Koordinasi antar Program (Pusat – Daerah)

Mekanisme Penyusunan Kegiatan yang *Pro Poor Budgeting* adalah cita-cita bersama. Dalam mempersiapkan anggaran tentunya BKM telah memikirkan keterpihakan pada warga miskin dan rentan, misal untuk kegiatan lingkungan dipastikan di lokasi yang sebaran warga miskin-nya tinggi, untuk kegiatan sosial dipastikan penerima manfaat adalah warga miskin potensial yang bisa menjadikan kegiatan sebagai bekal mencari/memperkuat mata pencaharian dan untuk kegiatan ekonomi dipastikan peminjam adalah warga miskin produktif yang memiliki usaha,

Terwujudnya bentuk partisipasi aktif oleh pemerintah daerah dapat berupa penyertaan DDUB yang diberikan kepada setiap kelurahan lokasi PNPM-MP di tiap tahunnya, DDUB ini berasal dari APBD yang menyertai DUB yang bersumber pada APBN, untuk Bojongsalaman seperti biasa untuk kegiatan pemanfaatan BLM APBD/DDUB lebih diarahkan kepada

kegiatan pinjaman ekonomi bergulir karena jumlahnya lebih sedikit (5% dari keseluruhan pagu)

Terimplementasikannya tata cara pencairan dana BLM PNPMP yang begitu rigid, ketat dan rumit di tingkat Kelurahan Bojongsalaman dengan sangat baik, merupakan prestasi yang patut diapresiasi, hal ini terjadi karena adanya komitmen dari pelaku (perangkat BKM). Dengan mekanisme ini tentunya sangat membuka terjadinya peluang komunikasi dua arah/multi arah antara para pihak yang terlibat dengan PNPMP secara rutin dan berkesinambungan (BKM dengan UP, BKM dengan KSM, UP dengan KSM, BKM dengan Pemkel).

Perangkat kelembagaan BKM juga dituntut untuk memikirkan tindak lanjut bagaimana aset hasil kegiatan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh warga miskin untuk dapat terus dipelihara sesuai dengan umur penggunaannya, situasi ini menjadi sangat rumit karena seperti halnya BKM di kelurahan lain, BKM Bojongsalaman dalam memfasilitasi terbentuknya KSM telah mempertimbangkan wilayah dan personil yang ditugaskan, misal : kegiatan lingkungan penataan saluran limbah rumah tangga RT 01 – RW 05, tentunya yang diberi tugas menjadi KSM adalah pengurus RT 01 – RW 05 ataupun warga lain di wilayah tersebut,

d. Kemitraan dan Kerjasama Kelembagaan (Dunia Usaha, Masyarakat)

Untuk menyatukan gerak langkah *stakeholder*, perlu adanya bagan struktur komando yang secara jelas mengatur garis koordinatif, konsultatif, pengawasan atau apapun yang terkait untuk menyatukan gerak langkah *stakeholder* dalam kelembagaan PNPMP di Kelurahan Bojongsalaman, hal ini sangat diperlukan karena beban BKM sangat berat dengan stigma “setiap tahun dapat bantuan ratusan juta, berapa orang miskin yang dapat dikurangi ?, koq malah tambah banyak“, dari lembaga lain tingkat kelurahan yang memandang BKM sebagai pengelola dana BLM PNPMP, tidak pernah ada yang menyadari bahwa tanggung jawab kelembagaan PNPMP ada di tiga pilar, masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli (akademisi, swasta, LSM, dll), BKM sebagai wakilnya masyarakat kelurahan, jadi kalau hanya mengandalkan BKM sebagai motor penggerak berkurangnya angka kemiskinan bisa diterima tapi kurang tepat, karena hakekatnya BKM mengajak masyarakat untuk sadar untuk belajar mengatasi permasalahannya secara mandiri dengan bantuan BLM PNPMP.

Perhatian mengenai tata cara penggunaan BLM PNPMP yang sudah terus disampaikan oleh tim fasilitator mulai tahun 2010 sampai saat ini dimana fokus penerima manfaat kegiatan

adalah warga miskin yang tercantum dalam PS-2 dengan alasan strategis tercapainya target pemenuhan IPM dan MDG's.

Arah kebijakan BKM semakin tahun, telah jelas akan menggeser orientasi kemanfaatan kegiatan lingkungan dari yang bersifat fasilitas publik dan komunal menjadi fasilitas privat/individu warga miskin, sehingga dengan mudah terukur dampak peningkatan kesejahteraannya, seperti halnya kegiatan sosial dan ekonomi yang langsung berbasis kepada privat/individu warga miskin (*by name by address*), pada gilirannya pemenuhan hak dasar warga miskin akan terealisasikan.

II. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

1. KSM di Kelurahan Tandang
 - a. KSM Tirto Agung, Kegiatan Pembangunan Tower Air. Salah satu kebutuhan mendesak bagi masyarakat RT 04 – RW 13, adalah adanya penampungan air yang bersifat komunal dan kolektif sebagai cadangan bagi ketersediaan air baku untuk masyarakat.
 - b. KSM Anak Bangsa 1, Kegiatan Pembangunan Rumah Pintar. Salah satu tujuan MDG's yang diarah oleh kelembagaan PNPM-MP adalah pendidikan untuk semua, sehingga dalam memfasilitasi warga masyarakat untuk melakukan prioritas kegiatan
 - c. KSM Manunggal, Kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Intervensi kegiatan KSM yang dapat dikatakan menyentuh orang miskin melalui kelembagaan PNPM-MP pada tingkat basis adalah memberikan kepada mereka pemenuhan aset yang bersifat pribadi/keluarga.
 - d. KSM Rogo Bersih, Kegiatan Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah. Dengan jumlah penduduk Kelurahan Tandang khususnya wilayah RW 04 mengalami permasalahan pengelolaan sampah yang volumenya sangat diluar batas kewajaran terutama sampah rumah tangga.
 - e. KSM Elang, Kegiatan Pinjaman Ekonomi Bergulir. Untuk meningkatkan kelembagaan PNPM-MP di sektor keuangan, BKM Manunggal Sejahtera meningkatkan kinerja keuangan dalam pengelolaan BLM PNPM-MP, Unit Pengelola Keuangan (UPK) tetap melakukan fasilitasi terhadap KSM-KSM yang akan melakukan aktivitas pinjaman dana bergulir untuk menambah modal usaha di masing-masing kelompok.
2. KSM di Kelurahan Bojongsalaman
 - a. KSM Elok. Kegiatan Perbaikan Gorong-Gorong. Posisi geografis Kelurahan Bojongsalaman yang dikitari oleh jalan besar/utama seperti Siliwangi dan Pamularsi menjadikan gorong-gorong

saluran air di perkampungan seringkali tidak mampu menampung luapan air.

- b. KSM Pustim. Kegiatan Perbaikan MCK Umum. BKM dan masyarakat memandang kebutuhan akan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah masih menjadi persoalan di Kelurahan Bojongsalaman.
- c. KSM Salaman. Kegiatan Perbaikan Posyandu. Seperti dimaklumi bersama bahwa negara kita masih termasuk negara yang memiliki angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang cukup tinggi demikian juga terhadap kesadaran menjaga kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui.
- d. KSM Merpati. Kegiatan Pengadaan Wirausaha Laundry. Sebagai entitas sosial kemasyarakatan BKM dituntut untuk dapat berperan dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi binaannya. Salah satunya adalah KSM Merpati yang berlokasi di RT 01 – RW 06 yang mencoba untuk berwira usaha dengan membuka usaha laundry (cuci pakaian/binatu).
- e. KSM Sekar. Kegiatan Pelatihan Menjahit. Kebutuhan akan tenaga terampil di bidang tekstil dan bahan konfeksi di Kota Semarang masih tinggi, mobilitas warga Kelurahan Bojongsalaman yang bekerja sebagai karyawan pabrik tekstil di kawasan industri Wijayakusuma Tugu, Simongan dan Tanjung Emas relatif banyak jumlahnya.

Lampiran 4

JUMLAH KEGIATAN KSM PER KECAMATAN

I. KECAMATAN SEMARANG BARAT

Kelurahan	KSM	Jenis Kegiatan Tri-daya
BOJONGSALAMAN	Merpati	Jasa Laundry
BOJONGSALAMAN	Puspa Mandiri	Pengadaan Cuci Motor
BOJONGSALAMAN	Barokah	Jasa Angkutan Sampah
BOJONGSALAMAN	Karya Mandiri	Pelatihan keterampilan elektronik
BOJONGSALAMAN	Salaman 4	Perbaikan Posyandu
BOJONGSALAMAN	Salaman 3	Perbaikan Jalan Dengan Paving
BOJONGSALAMAN	Salaman 2	Perbaikan Saluran
BOJONGSALAMAN	Salaman 1	Pembuatan Saluran
BOJONGSALAMAN	Karya Cipta	Pelatihan dan Pengadaan Alat membuat batik
BOJONGSALAMAN	Pustim	Perbaikan Kamar Mandi Dan WC
BOJONGSALAMAN	Trampil Karya	Pelatihan pertukangan mebel dan alat
BOJONGSALAMAN	Palma	Perbaikan Jalan Paving
BOJONGSALAMAN	Elok	Perbaikan Gorong-gorong
BOJONGSALAMAN	Mugi Sae 1	Rehab Rumah
BOJONGSALAMAN	Mandiri	Rehab Rumah
BOJONGSALAMAN	Karya Mulia	Rehab Rumah
BOJONGSALAMAN	Sari	Pelatihan Pembuatan Roti
BOJONGSALAMAN	Arum	Pengadaan perlengkapan posyandu
BOJONGSALAMAN	Sablon VI	Pelatihan sablon dan pengadaan alat
BOJONGSALAMAN	BANGSA II	Ekonomi Bergulir
BOJONGSALAMAN	BANGSA IV	Ekonomi Bergulir
BOJONGSALAMAN	BANGSA III	Ekonomi Bergulir
BOJONGSALAMAN	Bangsa V	Ekonomi Bergulir
BOJONGSALAMAN	Bangsa I	Ekonomi Bergulir
BOJONGSALAMAN	Puspa Mekar	Peralatan Posyandu
BOJONGSALAMAN	Laskar Panitia	Perbaikan MCK Umum
BOJONGSALAMAN	Sekar	Pelatihan jahit dan pengadaan alat
SALAMANMLOYO	Melati	Pelatihan menjahit dan pengadaan alat
SALAMANMLOYO	Puspa V	Perbaikan MCK
SALAMANMLOYO	Puspa IV	Perbaikan Gorong-gorong
SALAMANMLOYO	Puspa III	Perbaikan Rumah
SALAMANMLOYO	tirto arum	Pelatihan wirausaha cuci motor
SALAMANMLOYO	Puspa Jaya	Perbaikan gorong-gorong
SALAMANMLOYO	Puspa I	Perbaikan Gorong-gorong
SALAMANMLOYO	Mekar Sari	Bantuan Alat Peraga Edukasi
SALAMANMLOYO	Tunas Cemerlang	Rehab Rumah
SALAMANMLOYO	Puspa Warga	Perbaikan MCK
SALAMANMLOYO	Puspa Karya	Pembuatan Trtag dan pengadaan Kursi
SALAMANMLOYO	KENANGA 2	Ekonomi Bergulir

SALAMANMLOYO	LIMA SEKAWAN	Ekonomi Bergulir
SALAMANMLOYO	JAMBU 2	Ekonomi Bergulir
SALAMANMLOYO	KAMBOJA 2	Ekonomi Bergulir
SALAMANMLOYO	Salak	Ekonomi Bergulir

II. KECAMATAN TEMBALANG

Kelurahan	KSM	Jenis Kegiatan Tri-daya
ROWOSARI	Elang	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Garuda	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Cendrawasih	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Rajawali	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Kutilang	Jakan Paving Block
ROWOSARI	Mandiri	Jalan Paving
ROWOSARI	Mapan	Jalan Paving
ROWOSARI	Sejahtera	Jalan Paving
ROWOSARI	Taman Kebun(Paino)	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Nusa Indah	Pengadaaan APE
ROWOSARI	Tirtosari	Tandon Air bersih
ROWOSARI	Tirto Makmur	Sumur Bor
ROWOSARI	Guna Jaya 6	Taud Jalan
ROWOSARI	Guna Jaya 1	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Guna Jaya 2	Talud Jalan
ROWOSARI	Guna Jaya 3	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Guna Jaya 5	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Guna Jaya 7	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Guna Jaya 8	Guna Jaya 8
ROWOSARI	Guna Jaya 9	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Sambung Makmur	Pengadaan Pompa Diesel Air
ROWOSARI	Mugi Berkah 1	Budi Daya dan Penggemukan Kambing
ROWOSARI	Guna Jaya 4	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Karya Mandiri 5	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya Mandiri 6	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya Mandiri 8	Ekonomi BERgulir
ROWOSARI	Karya Mandiri 9	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya Mandiri 4	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya Mandiri 2	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya Mandiri 1	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Mugi Berkah 2	Budidaya dan Penggemukan Kambing
ROWOSARI	Muntuksari	Rehab Rumah
ROWOSARI	Kenari	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Karya 6	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Nusa Indah	Pengadaan alat Posyandu
ROWOSARI	Karya 2	Talud jalan
ROWOSARI	Karya 8	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya 1	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya 5	Ekonomi Bergulir

ROWOSARI	Karya IV	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya III	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya 7	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Karya 2	Ekonomi Bergulir
ROWOSARI	Kolibri	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Prenjak	Jalan Paving Block
ROWOSARI	Pleci	Jalan Paving Block
TANDANG	RW 11	Talud
TANDANG	Semangka	Ekonomi Bergulir
TANDANG	Tirto Agung	Tower Air
TANDANG	RW 12	Jalan Paving Blok dan Saluran
TANDANG	RW 12	Jalan Paving Blok dan Saluran
TANDANG	RW 11	Talud
TANDANG	Anak Bangsa 10	Pemb Gedung Rumpin
TANDANG	Tirto Agung	Tower Air
TANDANG	RW 14	Saluran
TANDANG	RW 14	Saluran
TANDANG	Gotong Royong	Rehab Rumah
TANDANG	Pujasera	Kios Pujasera
TANDANG	Optima	Ekonomi Bergulir
TANDANG	Prima	Ekonomi Bergulir
TANDANG	RW 1	Pekerjaan Talud
TANDANG	RW 7	Jalan Paving Blok dan Talud Saluran
TANDANG	Tunas Nusantara	Pembangunan Gedung Pos Paud
TANDANG	Pujasera	Kios Pujasera
TANDANG	Cikluwung 4	Gorong-gorong
TANDANG	Cikluwung 4	Gorong-gorong
TANDANG	Tirto Roso	Instalasi Air Bersih
TANDANG	RW 7	Jalan Paving Blok dan Talud Saluran
TANDANG	Tirto Roso	Instalasi Air Bersih
TANDANG	RW 6	Jalan Paving Blok dan Dinding
TANDANG	RW 6	Jalan Paving Blok dan Dinding
TANDANG	RW 9	Pekerjaan Perbaikan Saluran
TANDANG	Elang	Ekonomi Bergulir
TANDANG	Bahagia	Ekonomi Bergulir
TANDANG	Cenderawasih	Ekonomi Bergulir
TANDANG	Apel	Ekonomi Bergulir
TANDANG	Anak Cerdas	Sarana Prasarana Pos PAUD
TANDANG	Lancar Manunggal	Perbaikan Saluran dan Talud
TANDANG	Amanah	Pekerjaan Paving
TANDANG	Sarana Jaya	Pekerjaan Jalan Beton (Kantilever)
TANDANG	Manunggal	Rehab Rumah
TANDANG	Kukuh	Pekerjaan Jalan Beton
TANDANG	Perbaikan Rumah 2	Rehab Rumah
TANDANG	Perbaikan Rumah	Perbaikan Rumah
TANDANG	Rogo Bersih	Pengangkut Sampah (2 unit Tosa)
TANDANG	RW 11	Pekerjaan Talud
TANDANG	KSM RW 13	Talud

TANDANG	KSM RW 2	Gorong-gorong
TANDANG	KSM RW 1	Dinding Pengaman
TANDANG	KSM RW 1	Dinding Pengaman
TANDANG	KSM RW 13	Talud
TANDANG	KSM RW 11	Gorong-gorong
TANDANG	KSM RW 10	Talud
TANDANG	KSM RW 11	Gorong-gorong
TANDANG	KSM RW 2	Gorong-gorong
TANDANG	KSM RW 10	Talud

Lampiran 5:

Transkrip Hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

Transkrip hasil FGD yang melibatkan seluruh informan BKM/KSM, Konsultan, PJOK, TKPP, TKPK-D), sebagai berikut :

- a. Informan dari unsur Birokrat :
 - a.1. Model kelembagaan PNPM-MP yang diusulkan untuk memperbaiki kelemahan yang selama ini ada, sehingga akan memberikan kesempatan terjalannya komunikasi yang lebih intensif antara SKPD dan masyarakat (BKM) sebagai pemegang amanah penanggulangan kemiskinan.
 - a.2. Dalam model ini tiap komponen bergerak dalam mekanisme perencanaan yang lebih partisipatif dan terstruktur dengan produk PJM Pronangkis (BKM) dan Renja SKPD (SKPD), sangat memungkinkan integrasi perencanaan antara program kerja BKM dengan program kerja SKPD.
 - a.3. Peran BKM yang kuat, mengakar dan amanah dalam perannya menjadi penentu arah kebijakan kelembagaan PNPM-MP di kelurahan dengan mengintegrasikan konsep Tri Daya (Lingkungan/ Sosial/ Ekonomi) yang lebih moderat dan BKM dapat membangun kemitraan dan *channeling* program dengan lembaga lain.
 - a.4. Model ini memungkinkan peran PJOK dalam memfasilitasi BKM dan masyarakat Kelurahan untuk membangun integrasi kelembagaan dengan program dari Pemkot, dengan pengawasan program kerja BKM dan SKPD yang dapat disinkronkan dari masing-masing kecamatan.
- b. Unsur dari unsur Konsultan :
 - b.1. Model yang diusulkan diharapkan menjamin terlaksanakannya alur kegiatan sesuai tahapan yang mengarah pada daur program partisipatif yakni identifikasi ->

perencanaan -> pelaksanaan -> monitoring -> evaluasi yang sudah melembaga dalam PNPM-MP,

- b.2. Model ini memungkinkan terbangunnya potensi kemitraan dan *channeling* yang dilaksanakan BKM dengan mekanisme kontrol secara partisipatif untuk menuju kemandirian masyarakat, sehingga upaya kelembagaan PNPM-MP akan lebih terstruktur, berkelanjutan dan terukur
- c. Informan dari unsur kelembagaan masyarakat (BKM/KSM):
 - c.1. Model ini sangat memadai untuk menjadikan performa dan kinerja BKM, baik secara kelembagaan, keuangan dan program layak mendapatkan apresiasi positif dari jajaran pimpinan lembaga/badan/instansi yang memiliki program kerja yang dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan kelembagaan PNPM-MP di tingkat basis/kelurahan masing-masing.
 - c.2. Usulan model sejalan dengan kinerja KSM, baik secara kelembagaan, keuangan dan program yang berusaha diintegrasikan dalam pelaksanaan kelembagaan PNPM-MP di tingkat RT/RW masing-masing.
 - c.4. Tantangan yang dihadapi KSM adalah meyakinkan bahwa KSM yang telah terbentuk di seluruh wilayah Kelurahan mendapatkan personil yang mempunyai kesadaran kolektif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan secara nyata bukan hanya KSM papan nama.